

SINOPSIS

Kemacetan dan kepadatan jalan kini menjadi masalah utama yang dihadapi hampir semua kota besar di Indonesia. Tidak terkecuali Yogyakarta. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat ternyata tidak sebanding dengan kapasitas jalan menampung kendaraan, dampaknya kemacetan terjadi dimanamana, Kebijakan pemerintah daerah yang logis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah perlunya reformasi sistem angkutan publik di Provinsi DIY baik dari manajemen pengelolaannya maupun penyediaan sarana angkutan massal yang aman, nyaman, andal dan terjangkau.

Dengan demikian diperlukan sebuah sistem dan manajemen transportasi baru yang dapat mengganti sistem lama berbasis setoran menjadi sistem berbasis pelayanan. Kemudian lahirlah gagasan bus Trans Jogja dengan menggunakan skema pengelolaan buy the service atau pembelian pelayanan lewat kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan konsorsium dengan metode pengawasan secara tidak langsung lewat SPM (Standar Pelayanan Minimum).

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan yang bersifat kualitatif. Di dalam melakukan penelitian penulis memilih judul "*Evaluasi Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Dinas Perhubungan DIY Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Trans Jogja*" yang dilihat dari metode analisis aspek efektifitasnya yang dibagi kedalam 3 tiga sub bagian pisau analisisnya adalah , *pertama* efektifitas pelayanan, *kedua* efektifitas operasional dan *ketiga* akuntabilitas pelayanan yang kemudian dari menjabarkan beberapa permasalahan mulai dari load faktor, peningkatan kualitas pelayanan, sampai dengan keluhan-keluhan karyawan tentang kesejahteraan.

Kurangnya komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan program ini, terlihat dari lambannya pemerintah dalam merespon permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian Ketidaktegassan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait dengan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang tidak segera ditindak sesuai dengan ketentuan baik itu mengenai SPM yang menyebabkan pelayanan ini